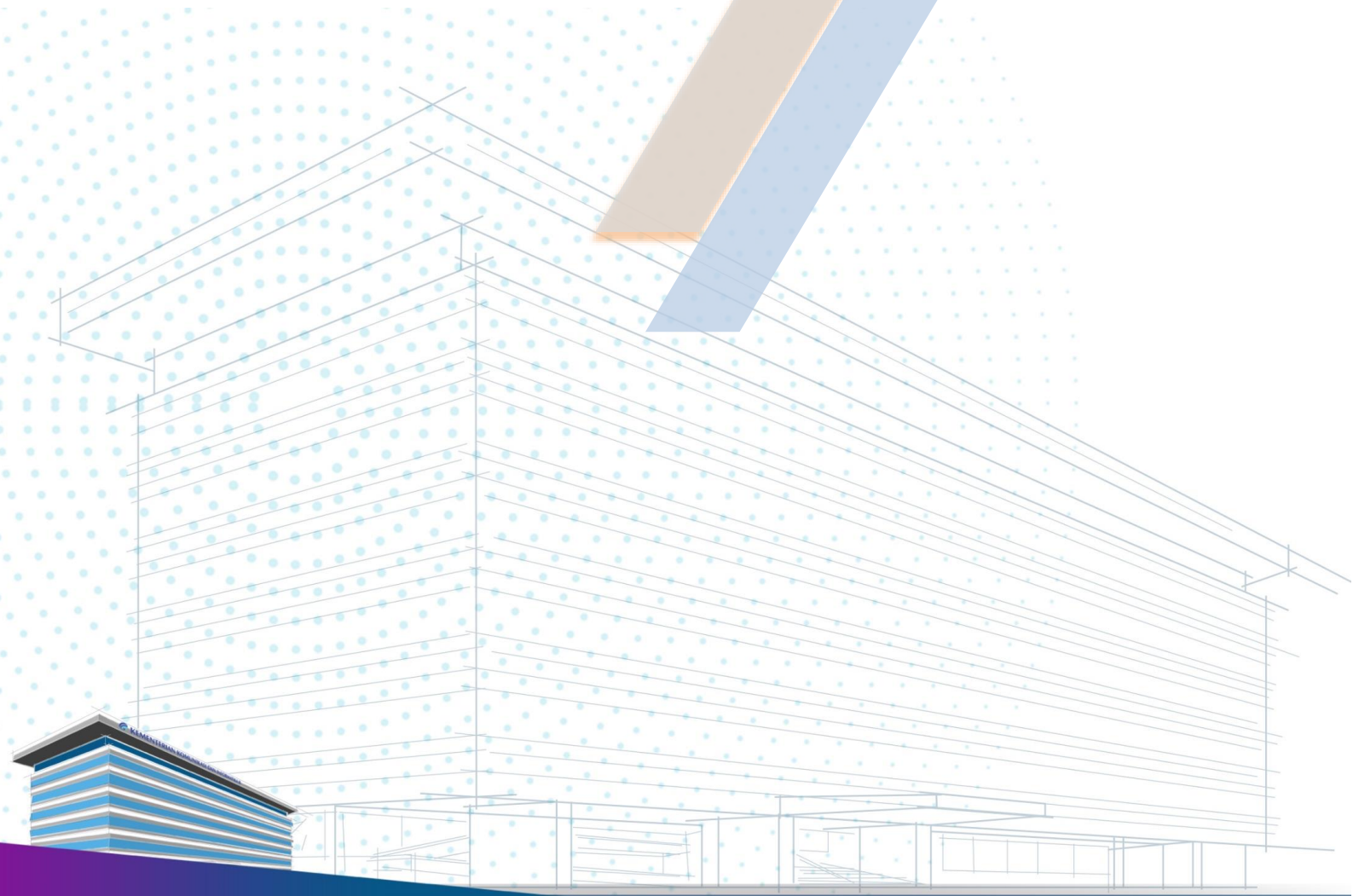


**Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika**

LAPORAN KINERJA 2018



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2017**

Pengarah:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Editor:

Sumiati

Penulis:

Prasetyo Hadi
Dewi Yuliana Lestari
Zaenuddin

Grafis:

Supriyanto
Nurjiyanto

**Diterbitkan oleh:
Bagian Perencanaan Program & Pelaporan Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Tahun 2019**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kondisi Umum	1
	B. Struktur Organisasi	2
	C. Kedudukan, Tugas, Fungsi	3
	D. Aspek Strategis	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	9
	B. Perjanjian Kinerja 2018	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Renstra 2018	19
	B. Kinerja Eselon I Tahun 2018	32
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	40
	B. Saran	41
	Lampiran Realisasi Keuangan 2018	43
	Lampiran Hasil Survei Online Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	45

BAB I

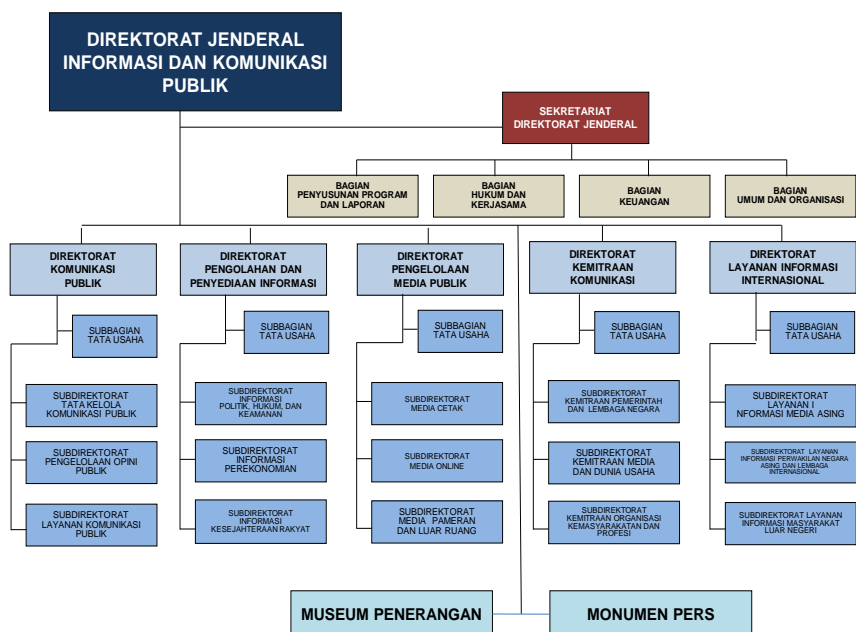
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

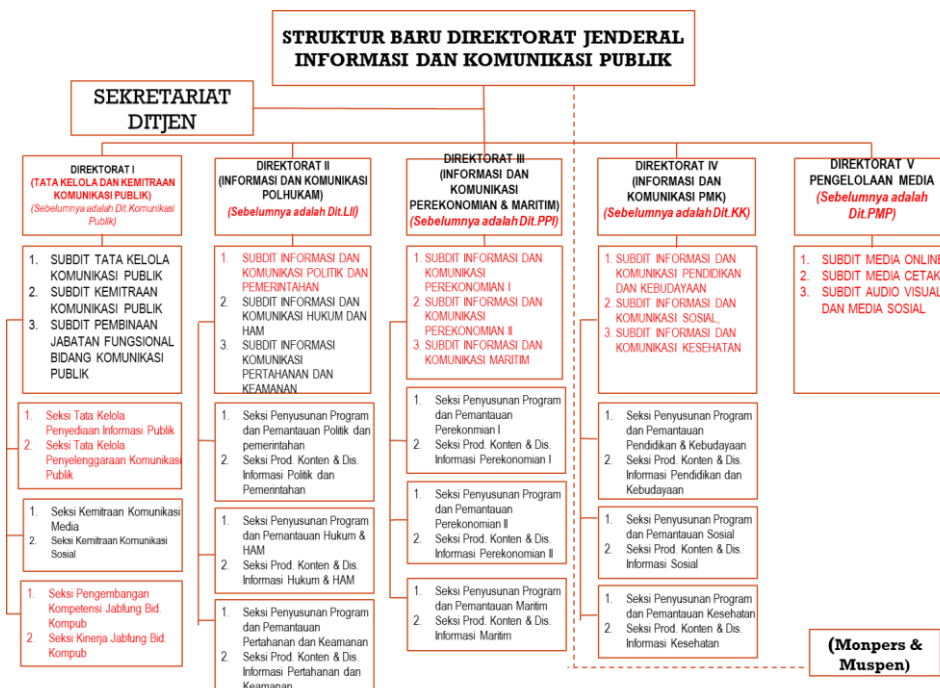
Tahun 2018 bagi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah tahun yang mempunyai dinamika tersendiri. Dinamika global baik dari aspek sosial, ekonomi dan politik menunjukkan adanya gejala 1) *information disruptive*, ketika informasi menyebar ke berbagai penjuru dalam waktu cepat dan mampu membuat fragmentasi perhatian setiap individu, 2) kewajiban lembaga pemerintah untuk menyediakan akses informasi publik kepada setiap warga negara untuk peningkatan kualitas hidupnya, 3) kebutuhan pelibatan publik melalui kolaborasi dalam memastikan informasi dan komunikasi publik berlangsung dengan cepat, transparan dan kolaboratif. Menjawab berbagai tantangan tersebut di bulan Agustus Menteri Komunikasi dan Informatika RI menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016. Revisi ini mengubah nomenklatur keseluruhan kerangka dasar layanan agar fungsi informasi dan komunikasi publik dapat dijalankan dengan lebih fokus, cepat dan terintegrasi.

Dari bentuk struktur organisasi yang sebelumnya berdasarkan proses bisnis diseminasi informasi menjadi struktur organisasi yang berorientasi proses *end to end*. Tujuan utama perubahan agar layanan informasi dan komunikasi publik memiliki kontribusi langsung dalam penciptaan reputasi pemerintahan dan negara serta menjawab dinamika komunikasi global, perkembangan teknologi, pola komunikasi masyarakat, adopsi pendekatan *Government Public Relations*, dan fungsi penyebaran informasi diarahkan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah secara utuh sehingga masyarakat memahami hasil pembangunan secara menyeluruh.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Sesuai Permenkominfo No.1 Tahun 2016 (dibuat ulang bagannya)



Gambar 2. Struktur Organisasi Baru Sesuai Permenkominfo No.6 Tahun 2018 (dibuat ulang bagannya)

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan**

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. **Tugas**

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai salah satu unit kerja di lingkup Kemenkominfo memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan seluruh kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

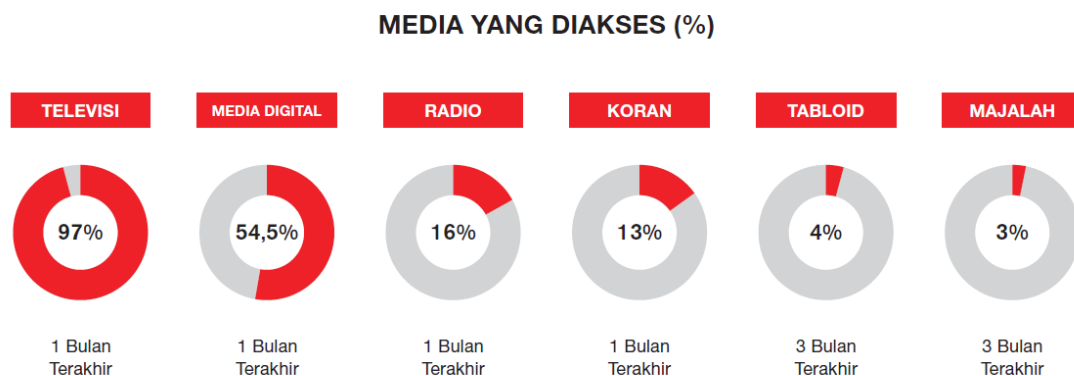
3. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. ASPEK STRATEGIS

Salah satu agenda pembangunan nasional berdasarkan Nawacita adalah meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki fungsi sebagai komunikator Pemerintah. Fungsi ini diturunkan dari [UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia](#) dan [UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#). Dengan demikian Direktorat Jenderal (Ditjen) IKP berperan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta jiwa mendapatkan akses terhadap informasi publik.



Gambar 3. Akses media di Indonesia berdasarkan Indonesia Millennial Report 2019 (buat gambarnya ulang ya!)

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ada 63 juta millennial, atau penduduk usia 20 - 35 tahun. Mereka ada di usia produktif. Besarnya jumlah penduduk millennial saat ini dapat menjadi tantangan dan peluang termasuk dalam pelaksanaan tata kelola informasi dan komunikasi publik. Berdasarkan Indonesia Millennial Report 2019, 97 persen Millennial melihat TV paling tidak 1x dalam 1 bulan terakhir. Sebanyak 55 persen mengakses media online, 16 persen mendengarkan radio, 13 persen membaca koran, dan hanya 3 persen yang membaca majalah atau tabloid.

Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh karena masih belum meratanya akses terhadap media dan ketersediaan konten informasi publik. Sebagai contoh, berdasarkan hasil Pemetaan Profil Target Audiens, Media, Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2017, masyarakat di Kepulauan Talaud memiliki akses terhadap televisi (57,1%) dan telepon selular (46,7%) yang sebagian besar adalah nelayan. Namun demikian, televisi dan telepon selular yang mereka miliki tidak dapat mengakses informasi mengenai program prioritas pemerintah terkait perikanan atau informasi lain yang pada dasarnya dibutuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian

informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo, dalam hal ini Ditjen IKP untuk:

- Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;
- Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- Melakukan *media monitoring* dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
- Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
- Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
- Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres No. 9 Tahun 2015 ini, Ditjen IKP diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relation "GPR"*). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

Maraknya berita negatif di berbagai media, serta informasi yang tidak terverifikasi maupun hoax yang beredar secara masif di media sosial di beberapa tahun belakangan ini sering menjadikan situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Hal ini tentunya merupakan suatu isu yang harus segera dicari solusinya karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas di bidang pengelolaan komunikasi publik, dimana pemerintah setiap saat wajib memonitor isu yang sedang berkembang, menyiapkan respons melalui koordinasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

Dalam menjalankan fungsi GPR, saat ini Ditjen IKP telah memiliki alur proses yang dilakukan dengan rutin. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan setiap alurnya, sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Kerja Government Public Relation

1. Data dan Informasi

Dalam menjalankan peran sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015 sebagai koordinator perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik, diperlukan peran serta dan komitmen dari K/L/D terkait dalam hal pengumpulan data dan analisis informasi. Kegiatan pengumpulan data dan analisis informasi merupakan langkah pertama dalam alur proses GPR, di mana informasi dari K/L/D terkait ini digunakan sebagai rujukan utama. Data dan informasi yang valid, tepat waktu, dan berkualitas merupakan langkah awal yang penting untuk menghasilkan keluaran baik berupa narasi tunggal maupun respon lainnya atas opini maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dan menetapkan agenda setting yang diharapkan pemerintah.

Sejak tahun 2015, telah ditempatkan Tenaga Humas Pemerintah (THP) pada 34 Kementerian. Tujuan dari penempatan THP ini adalah untuk memperlancar masukan data dan informasi terkait program prioritas pemerintah. Penempatan THP ini cukup membantu kelancaran data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kominfo dalam rangka menyusun narasi tunggal baik untuk penyampaian maupun manajemen isu terkait program prioritas pemerintah.

Namun demikian, penempatan THP ini dirancang sebagai katalisator saja, sampai dengan akhir 2019. Setelah masa penempatan THP ini selesai, akan disusun mekanisme lain yang direncanakan untuk menggantikan peran THP dalam memastikan kelancaran informasi dan keikutsertaan K/L/D dalam rangka mendukung Inpres No. 9 Tahun 2015.

2. Agenda Setting

Agenda setting merupakan kegiatan pengelolaan informasi publik pada GPR, yang secara umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- Tematik/Generik Program Prioritas: Penyusunan agenda berdasarkan tematik sesuai dengan program prioritas pemerintah; dan
- Isu Prioritas: Penyusunan agenda berdasarkan analisa isu/opini publik di bidang Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumberdaya serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

~~Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat dari~~ Dalam pengelolaan ~~isu~~ informasi, ~~nya, di mana~~ terdapat dua pendekatan yaitu: pemberitaan tematik/*campaign* yang sifatnya adalah ofensif atau pemberitahuan, ~~sedangkan dan~~ pemberitaan secara insidental ~~adalah yang bersifat~~ defensive atau merupakan *counter attack* atas pemberitaan terkait program pemerintah yang tidak sesuai. Meskipun demikian, tujuan dari kedua agenda setting ini sama, yakni untuk menyiapkan suatu narasi tunggal untuk membentuk persepsi yang sama dan positif pada masyarakat atas program prioritas Pemerintah. Sehingga, informasi yang disebarkan kepada masyarakat harus memenuhi suatu standar kualitas yang baik dan konsisten.

3. Konten

Produksi konten merupakan penerjemahan atas *agenda setting* ke dalam jenis informasi yang akan disebarluaskan. Konten atas satu informasi yang sama dapat diterjemahkan menjadi namun tidak terbatas pada *briefing notes*, siaran pers, infografis, videografis artikel, advertorial, dan sebagainya.

Jenis dan kuantitas informasi yang akan dihasilkan pada saat penyusunan konten idealnya akan sangat ditentukan oleh (1) banyaknya objek informasi yang akan disebarluaskan, dan (2) profil dari target penerima informasi. Informasi yang menjadi objek GPR adalah program prioritas pemerintah yang kontennya perlu disesuaikan dengan profil target penerima informasi. Kedua hal ini nantinya akan menentukan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi permintaan akan jumlah dan jenis konten yang harus diproduksi. Dengan banyaknya jenis dan jumlah konten yang harus diproduksi, sangat penting untuk tetap mampu menjaga standar dan kualitas, agar informasi yang dihasilkan memiliki mutu yang sama antara satu topik dengan topik lainnya.

Saat ini, jenis dan jumlah informasi yang digunakan untuk suatu *agenda setting* sangat tergantung dari ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Sehingga, tidak semua agenda dapat memiliki jenis dan jumlah informasi yang sama. Selain itu, saat ini juga belum terdapat suatu standar pemrosesan konten yang dapat memastikan tingkat kualitas yang seragam antar topik yang diangkat.

4. Diseminasi

Kegiatan diseminasi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang dilakukan dengan basis komunikasi langsung dan tidak langsung. Namun demikian, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia, kegiatan diseminasi ini perlu memiliki suatu strategi tersendiri. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut berperan dalam membentuk struktur demografi di Indonesia, di mana pembangunan yang belum merata berakibat pada perbedaan akses masyarakat terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi. Struktur demografi ini memberi tantangan tersendiri bagi proses diseminasi informasi, yakni bagaimana agar diseminasi informasi mampu menjangkau masyarakat Indonesia dengan struktur demografi yang beragam.

Dalam suatu strategi komunikasi, sangat penting untuk mengetahui profil dari target informasi (*audience*). Struktur demografi yang beragam tadi akan membentuk profil *audience* yang berbeda pada suatu daerah/komunitas/profesi, dan sebagainya. Dengan mengetahui profil dari *audience* ini, maka media diseminasi yang akan digunakan untuk penyebaran informasi juga akan disesuaikan. Pemetaan target informasi dan media diseminasi ini bermanfaat agar suatu informasi dapat tersampaikan kepada target yang tepat dengan cepat melalui media yang tepat. Namun demikian, saat ini kemkominfo belum memiliki peta profil target diseminasi. Sehingga variasi media komunikasi untuk meningkatkan ketepatan informasi yang disampaikan masih kurang maksimal, terutama untuk variasi media komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat rural, di daerah 3T, dan minim akses TIK.

Pelaksanaan diseminasi informasi juga melibatkan jaringan kelembagaan komunikasi, informasi dan kehumasan (KIK), yang secara potensi mencapai 956 lembaga dengan rincian 34 Kementerian, 129 lembaga pemerintah non Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 420 Pemerintah Kabupaten, 94 Pemerintah Kota, 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 104 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang masing-masing memiliki media/kanal penyebaran informasi seperti website, videotron, dan sebagainya. Banyaknya jenis dan jumlah kanal informasi pemerintah ini memiliki potensi jangkauan yang luas, terlebih lagi beberapa kanal-kanal informasi ini juga menjangkau hingga ke daerah-daerah.

Pemanfaatan kanal informasi pemerintah secara optimal mampu memberikan efek penyebaran informasi yang masif. Misalnya ketika diterbitkan suatu *campaign* tentang Tax Amnesty, dan disebar melalui seluruh kanal informasi pemerintah secara serentak dan konsisten dalam rentang waktu tertentu, maka akan ada banyak masyarakat akan menerima terpaan informasi yang konsisten, sehingga diharapkan akan memunculkan rasa keingintahuan lebih lanjut, hingga menjadi suatu topik pembicaraan di masyarakat, sehingga penyebaran informasi bisa menjadi lebih luas lagi. Namun demikian, fungsi Kemkominfo sebagai koordinator kehumasan Pemerintah masih belum maksimal karena belum maksimalnya strategi komunikasi yang dimiliki Kemkominfo untuk menyinergikan kekuatan penyebaran informasi di seluruh K/L/D. Hal ini tercermin dari belum seluruh kanal/media informasi yang dimiliki K/L/D digunakan untuk mendukung penyebaran informasi terkait program prioritas pemerintah.

5. Monitoring dan evaluasi

Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 adalah melakukan audit komunikasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Alasan perlunya dilaksanakan audit komunikasi antara lain: (1). mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik (2). membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang. (3). mengevaluasi kebijakan baru atau praktek komunikasi yang terjadi. (4). memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain. (5). menyusun anggaran kegiatan komunikasi. (6). menetapkan patok banding. (7). mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkan dengan patok banding tadi. (8). mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. (9). membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru.

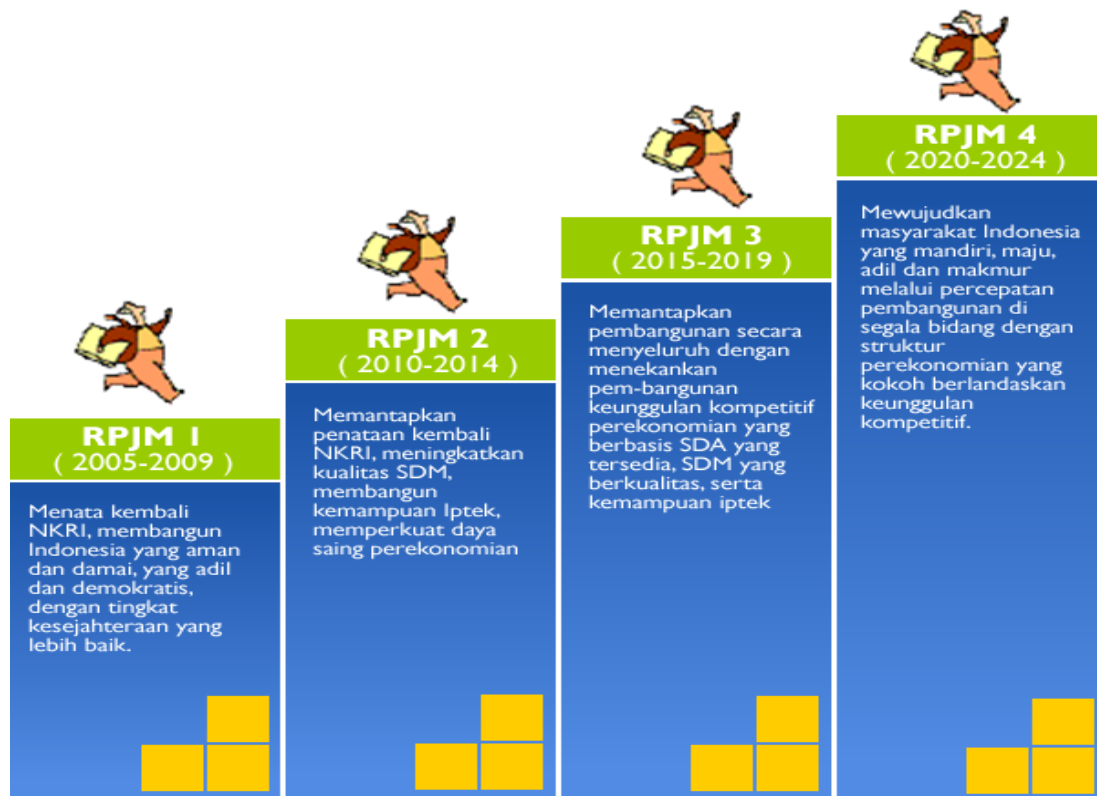
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sistem perencanaan yang baik akan mendorong keberhasilan pemerintah mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 5. Arah Pembangunan dan Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2024

Sebagai pengejawantahan RPJPN 2005-2024, Ditjen IKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien, dan akuntabel berpedoman kepada dokumen perencanaan, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek, yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
2. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019
3. Penetapan Kinerja Ditjen IKP Tahun 2017

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam periode 2015-2019 diprioritaskan kepada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019, Kemenkominfo menggulirkan koridor penyusunan program kerja terpilih untuk Renstra 2015-2019. Koridor penyusunan Renstra 2015-2019 dibatasi oleh janji Trisakti dan Nawa Cita.

Visi Kemenkominfo untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yakni **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Visi digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kemenkominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemenkominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK

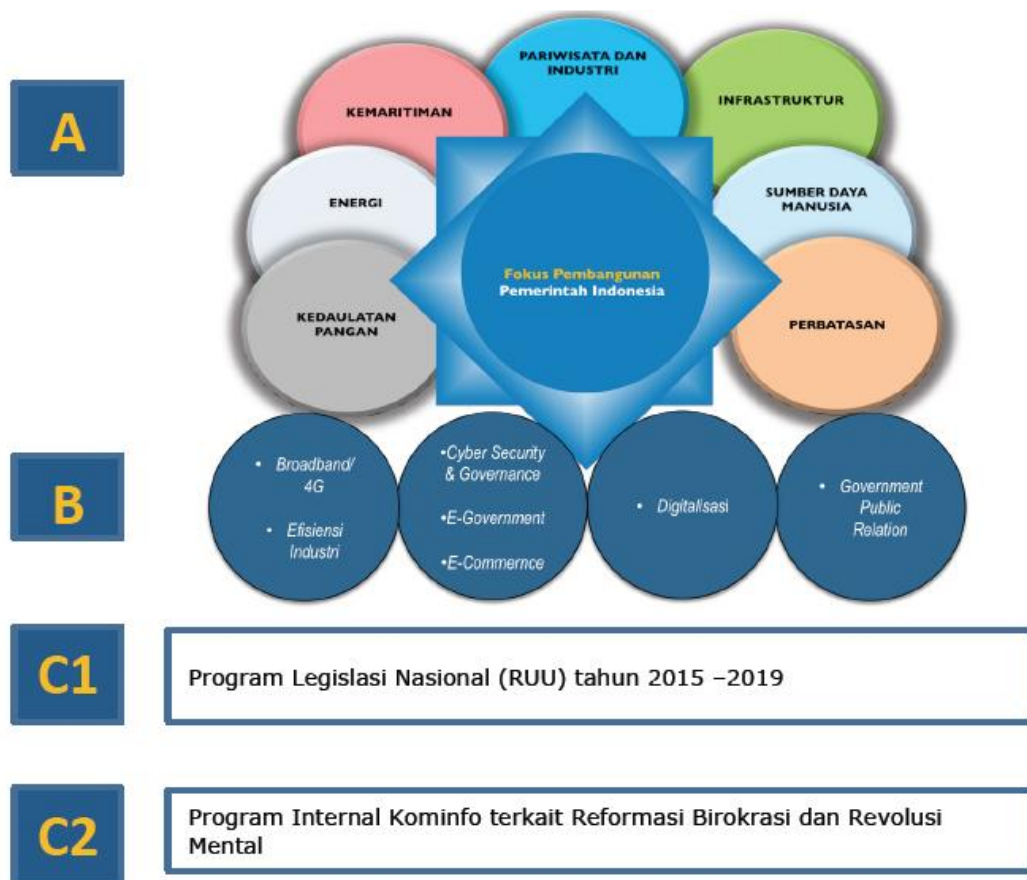
Sementara itu, **tujuan Kemenkominfo** antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun **Sasaran Strategis Pembangunan Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019** disusun dengan 4 fokus utama yakni:

1. Kemenkominfo sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan

2. Kemenkominfo sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kemenkominfo sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kemenkominfo sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.



Gambar 6. Fokus Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Tahun 2017 menjadi tahun ketiga bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, yang kemudian direvisi dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1. PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA 2015 – 2019
SEBELUM DAN SESUDAH REVISI**

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan		SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	
IKSS.1	Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	IKSS.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (<i>Jumlah Kab/kota: 514</i>)
IKSS. 2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	IKSS.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses <i>broadband</i> 4G LTE (<i>Jumlah Kab/kota: 514</i>)
IKSS. 3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)	IKSS.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (<i>Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa</i>) - Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa - Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa
IKSS.4	Jumlah penyediaan akses pitalebar internet	IKSS.4	Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (<i>Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan</i>) - Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas
IKSS.5	Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar nasional	IKSS.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita
		IKSS.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off</i> (ASO)
		IKSS.7	Persentase (%) nelayan dan petani <i>go digital</i> (<i>Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta</i>)
		IKSS.8	Persentase (%) UMKM <i>go digital</i> (<i>Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta</i>)

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
		IKSS.9	Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital ((<i>Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa</i>) - <i>Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa</i> - <i>Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa</i>
		IKSS.10	Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK
		IKSS.11	Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK
		IKSS.12	Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan		SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	
IKSS.1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar	IKSS.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (<i>Survei Responden/Publik</i>)
IKSS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring		
IKSS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (
IKSS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single public emergency number</i>)		
IKSS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo		
IKSS.6	Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE		

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan <i>e-government</i> Nasional		
IKSS.8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional		
IKSS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)		
SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman		SS. 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	
IKSS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	IKSS.1	Opini laporan keuangan
IKSS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer (NCIO)</i>	IKSS.2	Indeks Reformasi Birokrasi
IKSS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	IKSS.3	Nilai akuntabilitas kinerja
IKSS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik		
IKSS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Publik Relations (GPR)</i>		
IKSS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental		
SS. 4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien		-	
IKSS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi <i>pitalebar</i> , internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	-	-

PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015-2019)		PM Kominfo No. 21 Tahun 2016 Perubahan PM Kominfo No. 22 Tahun 2015 (RENSTRA 2015—2019)	
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
IKSS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda		
IKSS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo		
IKSS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas		
IKSS.5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS.6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo		
IKSS.7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan <i>Change Management</i>		
IKSS.9	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan		

Menyesuaikan revisi renstra Kemkominfo tersebut, terjadi perubahan juga terhadap rencana strategis di eselon I termasuk di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

Tabel 2. Perubahan Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Program	Sasaran	Indikator Semula	Indikator Menjadi	2017	2018	2019
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik						
	Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik					

		Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi	Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah;	70%	80%	90%
		Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi	Persentase (%)Konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan, berkualitas baik;	100%	100%	100%
		Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi	Persentase (%) Pemanfaatan Saluran Komunikasi dalam rangka Penyampaian Informasi Publik tentang kebijakan pemerintah disampaikan secara cepat dan tepat	70%	80%	90%
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik					
		Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik	Tidak dilanjutkan	-	-	-
		Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis	Tidak dilanjutkan	-	-	-

E. Perjanjian Kinerja 2018

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya perencanaan strategic dituangkan daam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak di capai dalam satu tahun dengan menunjukan sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode satu tahun ke depan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mendukung langsung capaian target dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kerja Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Peningkatan Pemahaman Masyarakat atas Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah	Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.	80%
		Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat	80 %
		Jumlah jangkauan, terpaan dan keterlibatan masyarakat (netizen) tentang informasi program prioritas pemerintah melalui internet	a. Jangkauan 107,4Juta b. Terpaan 75,1 Juta c. Engagement 11,2 Juta
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi	1. Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015	a. Kepatuhan pelaksanaan penyusunan narasi Tunggal 100% (KL) b. Kepatuhan penyebaran KL (70%) dan Pemda (40%)
		2. Persentase (%) SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik K/L/D yang Meningkatkan Kapasitas dan Kualitasnya dalam Mengelola Informasi: a. PPID b. Pranata Humas c. Personil Dinas Kominfo	a. 80 % (Jumlah K/L/Prov) b. 80 % (Jumlah K/L/Prov) 80 % (Jumlah Prov)
		3. Persentase (%) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi (Nawacita Digital Library, indonesia.go.id, KontenBasis Agenda Setting)	100%
		4. Jumlah Pedoman Acuan Penyusunan Konten	4

BAB III

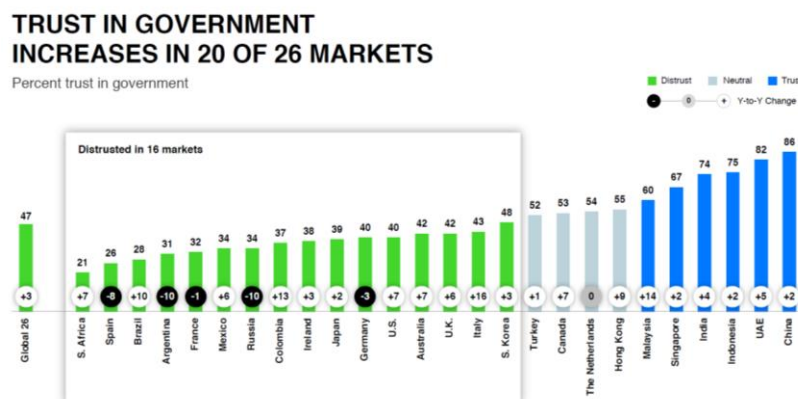
AKUNTABILITAS KINERJA

A) Capaian Renstra Kemkominfo yang didukung oleh capaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2018

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dengan hasil capaian satu tahun. Dalam mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja organisasi.

Salah satu capaian kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2018 untuk mendukung capaian Rencana Strategis Kementerian Kominfo, tertuang dalam Sasaran Strategis nomor 2 Renstra Kemkominfo yakni Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang mempunyai target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik).

Tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam release terbaru dari Edelman Trust Barometer Tahun 2019 dimana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia mendapatkan skor yang tinggi (75%). Terdapat kenaikan 2 poin dari skor tahun lalu yang menempatkan pemerintah Indonesia masuk kedalam 6 (enam) negara yang ada di level terpercaya. Pemerintah Indonesia menempati urutan kedua sebagai institusi yang dipercaya masyarakat setelah institusi bisnis (79%) dan dibawahnya ada seperti media (70%) dan NGO/LSM (68%).



Gambar 7. Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2019 (<https://www.edelman.com/trust-barometer>)

Trust in Institutions	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Government	36%	49%	49%	65%	58%	71%	73%	75%
Media	68%	73%	69%	68%	63%	67%	68%	70%
Business	63%	69%	68%	70%	71%	76%	78%	79%
NGO's	49%	53%	62%	64%	57%	64%	67%	68%

Tabel 4. Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2019 (<https://www.edelman.com/trust-barometer>) (bikin gambar ya mas)

Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan publik, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Government Public Relations dalam mendiseminasikan informasi tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah menjadi krusial. Capaian dari indikator persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik dari Tahun 2015 – 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.1 Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	60%	71% *Diambil dari Trust Barometer	50%	73 % *Diambil dari Trust Barometer	60%	75 % *Diambil dari Trust Barometer	60%	69,43% *Survei Balitbang SDM Kemkominfo

B) *Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional Pada Masyarakat*

Dilaksanakan oleh Tim Peneliti Puslitbang Aptika dan IKP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal IKP.

Latar Belakang

Berangkat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik, disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini pun menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diukur dengan melihat akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Sejauh ini, belum ada penelitian yang mengukur pelaksanaan pengelolaan informasi publik dengan skala nasional, beberapa penelitian sebelumnya terbatas pada publik online, ataupun publik lain yang tidak berfokus pada akses dan kualitas informasi publik. Informasi publik yang termasuk dalam penelitian ini adalah informasi program pemerintah yang termasuk dalam program pemerintah yang juga termasuk dalam prioritas nasional. Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari hasil focus group discussion dengan beberapa stakeholder yang merupakan irisan dari informasi program pemerintah yang di disseminasikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) dan juga termasuk dalam prioritas nasional, yaitu: (1) Informasi imunisasi (campak rubella); (2) Informasi terkait pemblokiran konten radikalisme; (3) Informasi terkait ekonomi digital; dan (4) Informasi terkait Asian Games dan Asian Para Games.

Tujuan Penelitian

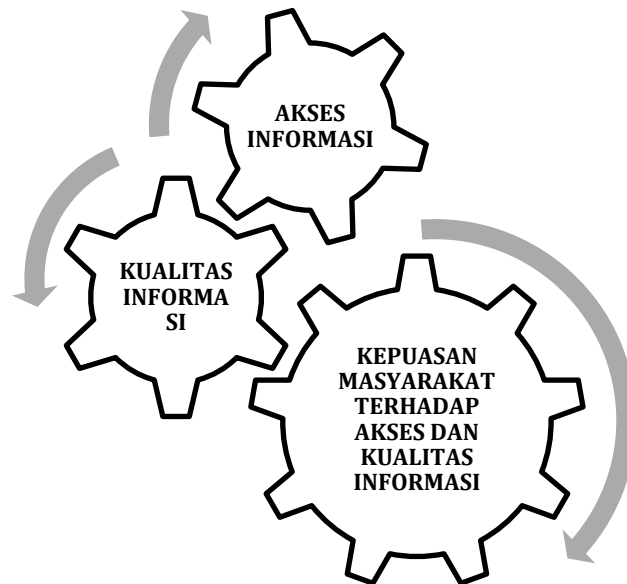
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait informasi program pemerintah yang mereka terima. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar yang menjawab indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 yaitu terkait ketersediaan akses dan kualitas informasi publik.

Konsep

Terdapat 3 (tiga) konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Akses informasi: kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan (Permenkominfo No. 10 Tahun 2010). Dan juga dilihat dari ketersediaan media komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut (Permenkominfo No. 17 tahun 2009); (2) Kualitas Informasi: dilihat pada sejauh mana informasi publik terkait isu prioritas nasional yang diterima oleh masyarakat dapat memenuhi dimensi yang membentuk kualitas informasi. Penilaian kualitas informasi ini

terletak pada persepsi masyarakat terhadap informasi publik yang mereka terima. Dimensi yang membentuk kualitas informasi terdiri atas dimensi subjek (penerima informasi) dan proses (media yang digunakan); (3) Kepuasan Masyarakat: diukur dengan melihat persepsi masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi yang mereka rasakan. Masyarakat akan dinilai puas jika ekspektasi mereka terhadap akses dan kualitas informasi sesuai dengan yang mereka harapkan.

Summary



Gambar 8. Kerangka Konsep Penelitian

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan publik pengumpulan data menggunakan publik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan publik wawancara, dimana responden tidak secara langsung mengisi kuesioner melainkan surveyor menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden seperti yang tertulis dalam kuesioner dan kemudian mengisi jawaban kuesioner sesuai dengan jawaban dari responden.

Total responden dalam penelitian ini adalah 2400 responden, dengan 6 responden yang non-respon. Penelitian ini menggunakan stratifikasi proporsional dengan inisiasi sama besar. Penelitian ini dilaksanakan di 18 provinsi, 72 Kota/Kabupaten, dan 144 Kelurahan/Desa. Survei ini disajikan dengan statistik deskriptif dan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk menjawab publik kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dibutuhkan satu angka yang kemudian akan disebut sebagai Indikator Akses dan Kualitas Informasi Publik (IAKIP), yang merupakan indeks komposit yang dibangun oleh dimensi akses dan kualitas informasi publik. Sehingga dilakukan pembakuan (standardized) satuan di setiap pertanyaan dengan skala 0 hingga 1. Adapun rumus standardized yang digunakan:

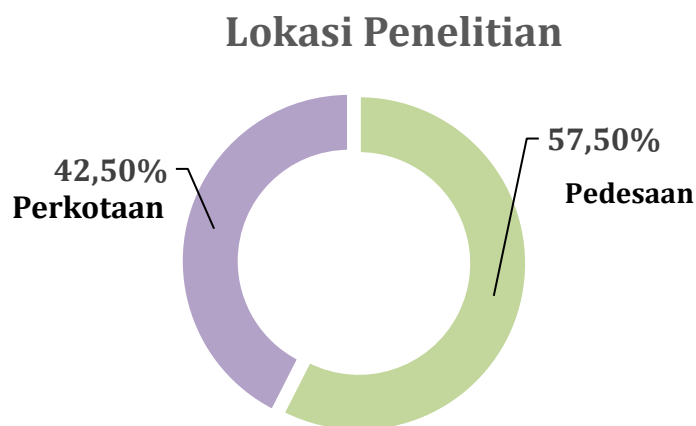
$$IAKIP: 1/3 (DAI + DKIP + DK)$$

- DAI : Dimensi Akses Informasi
- DKIP : Dimensi Kualitas Informasi Publik
- DK : Dimensi Kepuasan Masyarakat

Hasil Penelitian

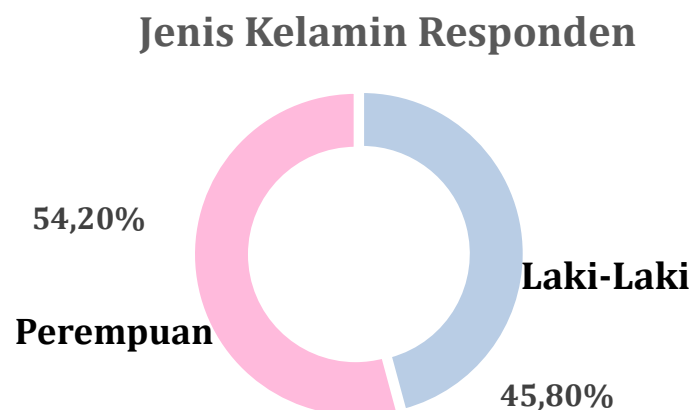
a) Profil Responden

Dari 144 kelurahan/desa yang termasuk dalam lokasi penelitian ini, data menunjukkan bahwa mayoritas responden (57,50%) berasal dari daerah pedesaan, dan sebanyak 42,50% responden berasal dari daerah perkotaan. Kategori perkotaan dan pedesaan ini disesuaikan dengan kategori yang berasal dari Podes BPS tahun 2011.



Gambar 9. Persentase Responden Berdasarkan Lokasi Penelitian

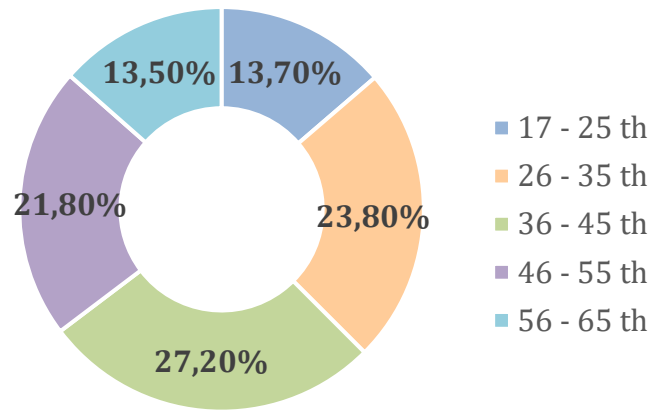
Jika dibagi berdasarkan jenis kelamin, dari 2394 data responden yang terlibat dalam penelitian ini mayoritas responden merupakan perempuan dengan persentase 54,20% dan laki-laki berkisar di 45,80% responden. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa perbandingan responden perempuan dan laki-laki masih dapat dikatakan berimbang.



Gambar 10. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Bila dibagi berdasarkan rentang usia, diketahui bahwa responden paling banyak berada di rentang usia 36 – 45 tahun (27,20%) dan paling sedikit adalah responden dengan rentang usia 56 – 65 tahun (13,50%). Sedangkan persentase responden usia dewasa muda di rentang usia 17 – 25 tahun sejumlah 13,70%, dan responden dengan usia 26 – 35 tahun sebesar 23,80%.

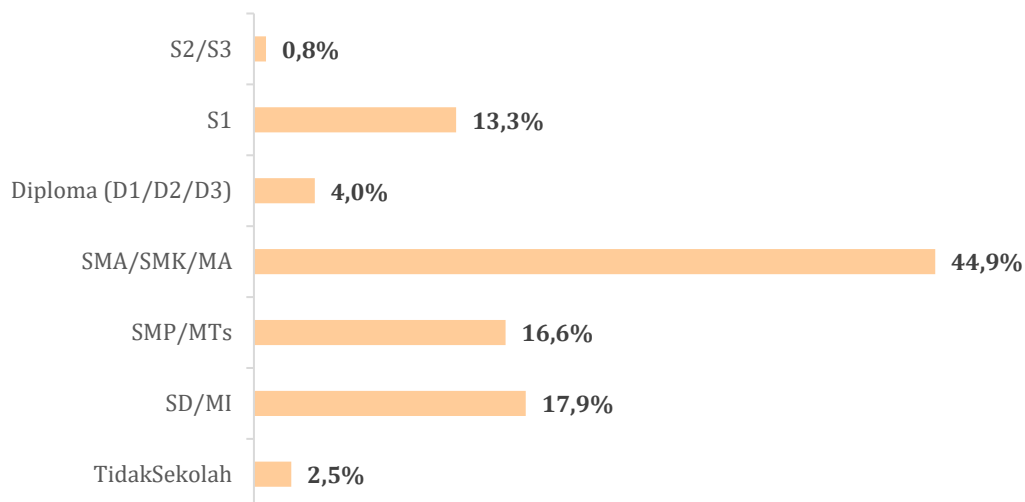
Rentang Usia Responden



Gambar 11. Persentase Responden Berdasarkan Rentang Usia

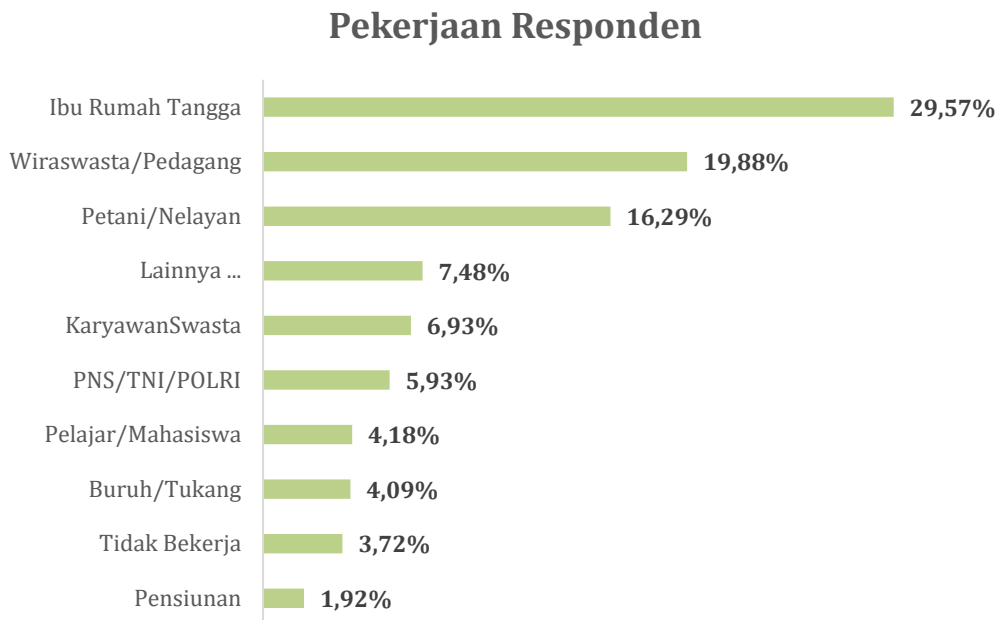
Melihat dari tingkat pendidikan, responden terbanyak memiliki latar akademik SMA/SMK/MA (44,9%) dan paling sedikit adalah responden dengan latar akademik S2/S3 (0,8%). Sementara itu, persentase responden dengan tingkat SMP/MTs dan SD/MI nyaris sama yaitu SMP/MTs (16,6%) dan SD/MI (17,9%). Sedangkan responden dengan tingkat diploma (D1/D2/D3) sebesar (4,0%) disusul S1 sebesar (13,3%) dan responden yang tidak sekolah sebesar (2,5%).

Pendidikan Terakhir Responden



Gambar 12. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pekerjaannya, mayoritas responden bekerja sebagai ibu rumah tangga (29,57%), wiraswasta/pedagang (19,88%), dan petani/nelayan (16,29%). Sedangkan jenis pekerjaan dengan jumlah persentase responden yang paling sedikit adalah responden yang bekerja sebagai pensiunan (1,92%).

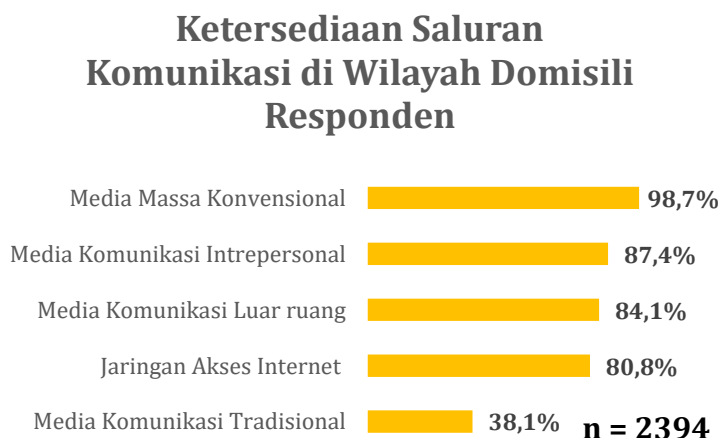


Gambar 13. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

b) Akses Informasi

Dimensi akses informasi merupakan salah satu dimensi pembentuk 24ublic24or akses dan kualitas informasi 24ublic. Dimensi ini terdiri dari 2 subvariabel, yaitu ketersediaan media/saluran komunikasi dan kemudahan mendapatkan informasi.

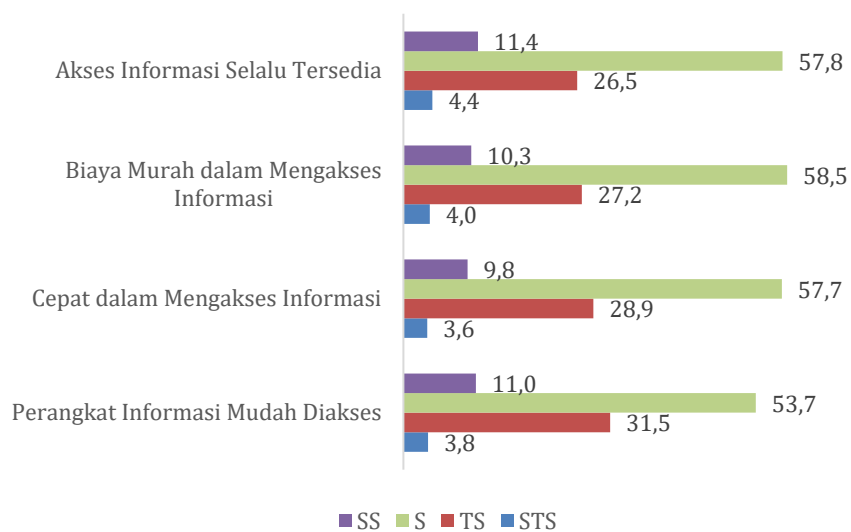
Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa media massa konvensional seperti televisi, surat kabar, radio, dan bioskop merupakan media/saluran komunikasi yang paling banyak (98,7%) tersedia di wilayah domisili responden. Sedangkan untuk saluran komunikasi yang ketersediaannya dirasakan masih minim atau jarang adalah media komunikasi tradisional seperti pertunjukkan rakyat (38,1%).



Gambar 14. Persentase Ketersediaan Saluran Komunikasi

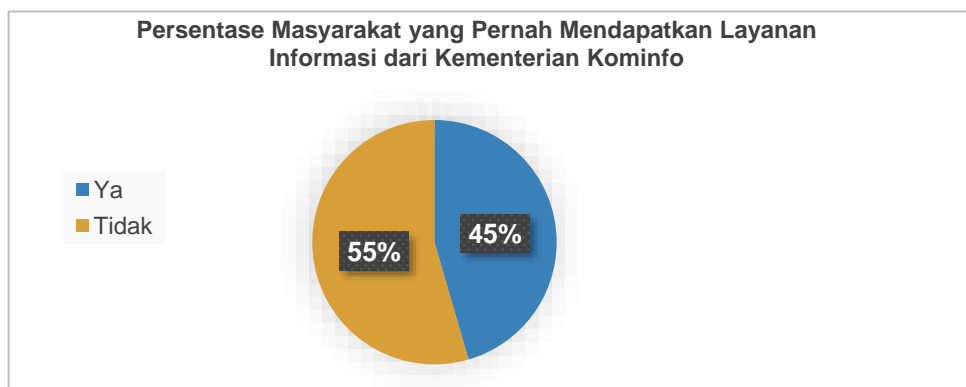
Untuk kemudahan responden mendapatkan informasi berdasarkan keterjangkauan responden terhadap saluran komunikasi, masing-masing responden menjawab sesuai dengan media yang responden rasa tersedia di wilayah tempat tinggalnya. Dari hasil penelitian ini, secara keseluruhan responden setuju bahwa mereka merasa mudah mendapatkan informasi dari saluran komunikasi yang tersedia di wilayahnya.

Terkait dengan akses informasi 25 ublic terkait program prioritas pemerintah, penelitian ini melihat persepsi responden terhadap akses informasi 25ublic tersebut. Terdiri dari beberapa aspek seperti kemudahan mengakses perangkat informasi (gadget), kecepatan dalam mengakses informasi, biaya yang murah dalam mengakses informasi, dan ketersediaan akses informasi yang dapat diakses kapan saja dimana saja, mayoritas responden (11,4% Sangat Setuju dan 57,8% Setuju) cenderung setuju bahwa mereka dapat mengakses informasi program prioritas pemerintah kapan saja dan dimana saja (akses informasi selalu tersedia)



Gambar 15. Persepsi Responden Terhadap Akses Informasi Publik

Berfokus pada layanan informasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 45% responden menjawab pernah menerima informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun layanan informasi Kementerian Kominfo yang paling banyak diterima oleh masyarakat berasal dari layanan broadcast sms Kominfo (52,2%) dan akun media sosial Kominfo (41,9%).

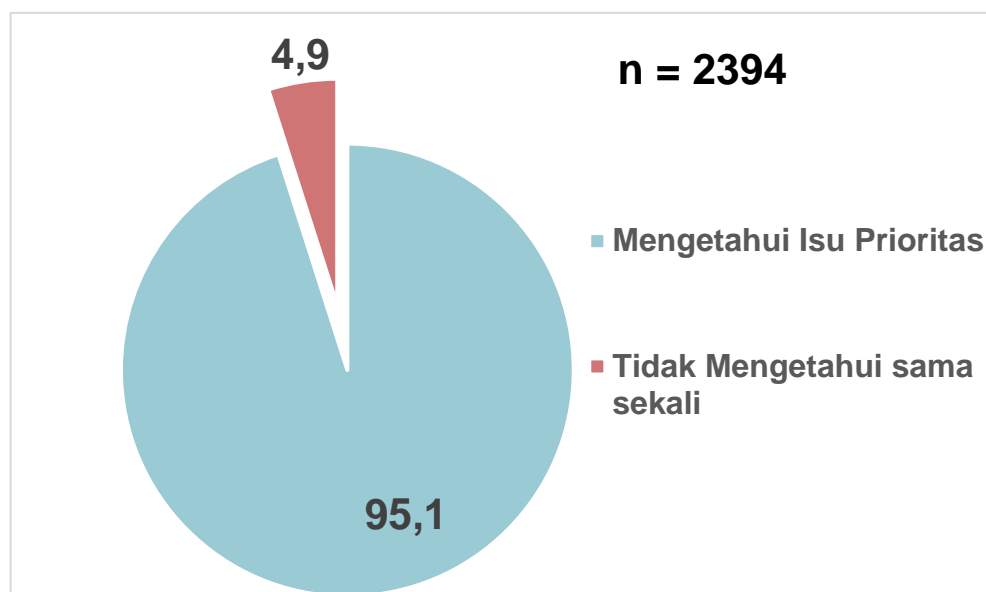


Gambar 16. Persentase Responden yang Menerima Layanan Informasi Kementerian Kominfo

c) Kualitas Informasi

Dimensi kualitas informasi pada penelitian ini pertama dilihat dari pengetahuan responden terhadap informasi 26 public terkait program prioritas pemerintah seperti informasi imunisasi campak rubella, pemblokiran konten radikalisme, ekonomi digital, dan informasi terkait Asian Games dan Asian Para Games.

Dari 2394 data responden yang terkumpul, dapat dilihat bahwa 95,1% responden mengetahui minimal satu informasi 26public terkait informasi program prioritas pemerintah dan hanya 4,9% responden yang tidak mengetahui isu prioritas sama sekali.

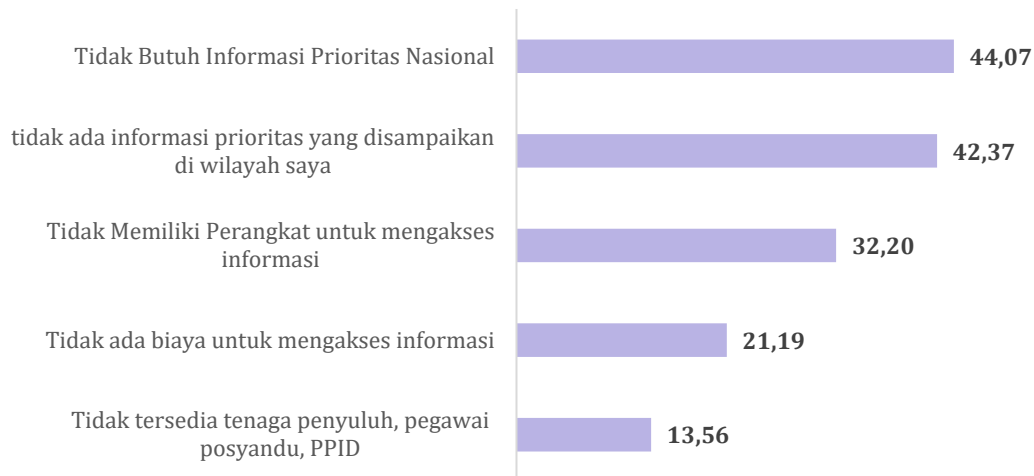


Gambar 17. Persentase Responden yang Mengetahui Informasi Publik

Dari ke-empat informasi 26public terkait program prioritas pemerintah yang masuk ke dalam penelitian ini, informasi yang paling banyak diketahui adalah informasi terkait imunisasi campak rubella (93,8%) dan informasi terkait Asian Games dan Asian Para Games (92,35%), sedangkan untuk informasi yang paling banyak dibutuhkan oleh responden adalah informasi terkait imunisasi campak rubella (89,3%). Untuk informasi seperti pemblokiran konten radikalisme dan ekonomi digital, masih banyak responden yang merasa butuh informasi tersebut namun merasa belum pernah mendapatkan informasi tersebut.

Dari 118 responden yang menjawab tidak mengetahui informasi program prioritas pemerintah sama sekali, ternyata hal yang menjadi 26public26 utama mereka adalah karena mereka merasa tidak butuh informasi tersebut sama sekali. Selain itu, ketidaktersediaan informasi program prioritas pemerintah di wilayah responden pun menjadi 26public26 yang membuat responden tidak mengetahui informasi tersebut sama sekali.

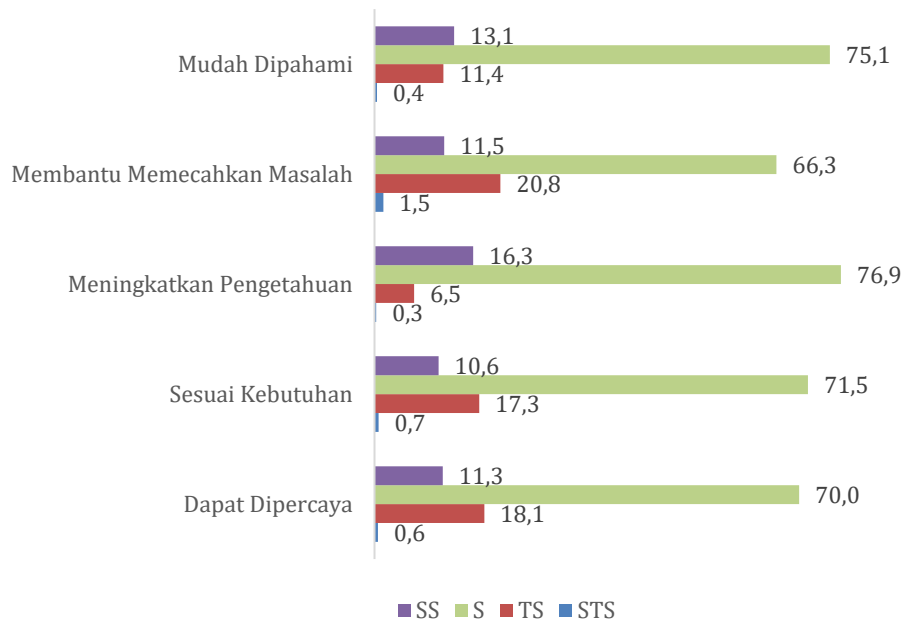
Alasan Tidak Mengetahui Informasi Program Prioritas Nasional



**Gambar 18. Alasan Responden Tidak Tahu Informasi Program
Prioritas Nasional**

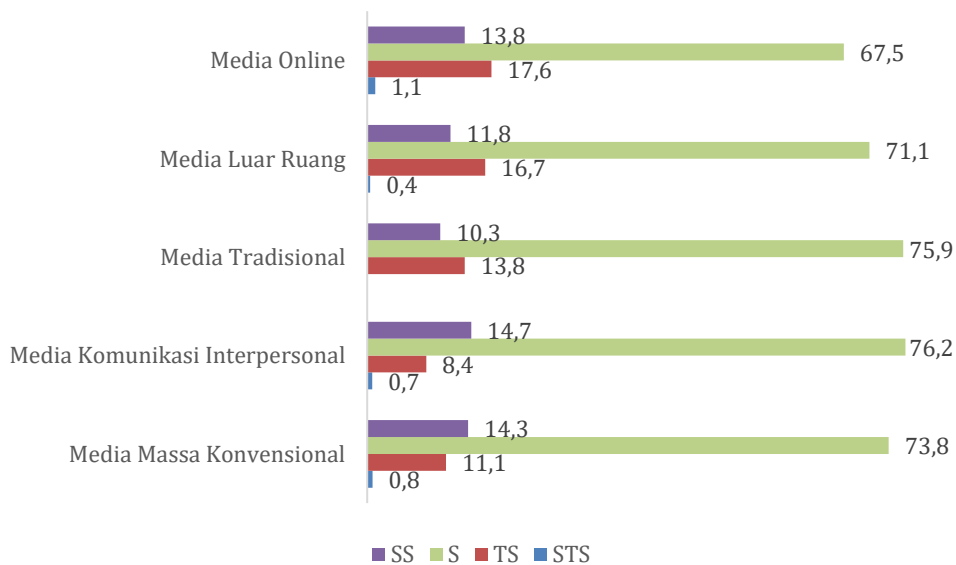
Terkait dengan media komunikasi yang digunakan oleh responden untuk mendapatkan informasi terkait program prioritas pemerintah, media yang masih dominan atau paling banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut adalah media televisi. Baik untuk informasi terkait imunisasi campak rubella, pemblokiran konten radikalisme, ekonomi digital, serta Asian Games dan Asian Para Games, media televisi tetap menjadi media yang dominan yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Selain itu media televisi, penyuluh/pegawai posyandu sebagai bagian dari media komunikasi interpersonal juga menjadi media yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan informasi terkait imunisasi campak rubella.

Sedangkan untuk informasi pemblokiran konten radikalisme, ekonomi digital, serta Asian Games dan Asian Para Games, selain media televisi, media sosial merupakan media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan Twitter merupakan media yang juga banyak digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Berdasarkan konten informasi program prioritas pemerintah yang diterima oleh para responden, mayoritas setuju bahwa konten tersebut dapat meningkatkan pengetahuan responden (16,3% Sangat Setuju dan 76,9% Setuju).



Gambar 19. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Informasi Berdasarkan Konten Informasi

Berdasarkan ketepatan penyampaian informasi di masing-masing saluran komunikasi, mayoritas responden setuju bahwa penyampaian informasi program prioritas pemerintah melalui saluran komunikasi yang ada saat ini sudah tepat.



Gambar 20. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Informasi Berdasarkan Ketepatan Penyampaian Informasi di Media

Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik terkait Program Prioritas Nasional

Untuk dimensi kepuasan masyarakat, penelitian ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat 3 aspek yang dilihat dari masing-masing media, yaitu aspek keakuratan informasi, kecepatan penyampaian informasi, dan ketersediaan informasi. Masing-masing responden memiliki persepsi yang berbeda terkait akses dan kualitas informasi berdasarkan media yang mereka gunakan. Untuk media massa konvensional (televisi, surat kabar, radio, dan bioskop) mayoritas responden yang mendapatkan informasi 29 ublic dari media tersebut cenderung puas akan kecepatan penyampaian informasi program prioritas pemerintah di media massa konvensional. Sedangkan untuk media komunikasi interpersonal (penyuluh, petugas posyandu, forum diskusi), responden yang menerima informasi dari media tersebut mayoritas cenderung puas akan ketersediaan informasi di media komunikasi interpersonal. Untuk media tradisional seperti pertunjukkan rakyat, responden yang mendapatkan informasi 29 ublic dari media tersebut mengaku puas akan kecepatan penyampaian informasi dan ketersediaan informasi program prioritas pemerintah di acara pertunjukkan rakyat yang mereka saksikan. Untuk media luar ruang (baliho, spanduk, pamphlet/leaflet, iklan transportasi umum), mayoritas responden yang mendapatkan informasi program prioritas pemerintah dari media tersebut cenderung puas akan ketersediaan informasi program prioritas pemerintah di media luar ruang. Sedangkan untuk responden yang menerima informasi program prioritas pemerintah dari media online (media sosial, situs berita online, situs pemerintahan, instant messaging), mayoritas cenderung puas akan kecepatan penyampaian informasi di media online.

Indikator Akses dan Kualitas Informasi Publik

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk 29 ublic 29 or akses dan kualitas informasi 29 ublic diperoleh dari perhitungan skor (scoring) dimensi akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi. Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter dari dimensi akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat diperoleh hasil 69,43% yang menunjukkan 29 ublic 29 or akses dan kualitas informasi 29 ublic di dalam penelitian tersebut.

Variabel	Sub Variabel	Parameter	Skor
Akses Informasi	Ketersediaan Media	7	0,455
		8	0,987
		9	0,926
		10	0,510
		11	0,366
		12	0,924
	Kemudahan Mendapatkan Informasi	8.1	0,562
		8.2	0,763

		8.3	0,636
		8.4	0,433
		9.1	0,786
		9.2	0,781
		10.1	0,757
		10.2	0,674
		11.1	0,786
		12.1	0,694
		12.2	0,686
		12.3	0,585
		14	0,680
		15	0,684
		16	0,688
		17	0,690
Kualitas Informasi Publik	Persepsi Pengguna terhadap Kualitas Informasi	13.1.3	0,772
		13.2.3	0,617
		13.3.3	0,550
		13.4.3	0,646
	Proses Perolehan Informasi	13.1.1	0,926
		13.2.1	0,510
		13.3.1	0,366
		13.4.1	0,924
Kepuasan Masyarakat	Ketersediaan informasi di media sudah terpenuhi	28	0,736
		31	0,748
		34	0,776
		37	0,708
		40	0,735
	Kecepatan penyampaian informasi melalui media sudah memenuhi harapan	29	0,743
		32	0,730
		35	0,767
		38	0,695
		41	0,761
	Keakuratan informasi di media sudah memenuhi harapan	30	0,725
		33	0,746
		36	0,767
		39	0,704
		42	0,682

Tabel 6. Scoring Hasil Survey

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter dari dimensi akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat diperoleh hasil **69,43%** yang menunjukkan indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas responden telah mengetahui informasi-informasi program prioritas pemerintah yang termasuk dalam

penelitian ini. Media yang digunakan oleh para responden untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut pun beragam, sesuai dengan ketersediaan saluran komunikasi di wilayah tempat tinggal responden. Media massa konvensional seperti televisi tetap menjadi media yang paling banyak tersedia di lingkungan tempat tinggal responden dan juga paling banyak digunakan oleh responden untuk mendapatkan informasi program prioritas pemerintah. Sedangkan saluran komunikasi yang aksesnya masih terbatas adalah media tradisional seperti pertunjukkan rakyat. Meskipun media televisi menjadi media yang dominan digunakan, tapi ada beberapa informasi program prioritas pemerintah yang juga banyak diperoleh dari media sosial (informasi pemblokiran konten radikalisme, ekonomi digital, Asian Games & Para Games) dan juga media interpersonal seperti penyuluh dan petugas posyandu (informasi imunisasi campak rubella).

Mayoritas responden sudah setuju bahwa informasi program prioritas pemerintah yang mereka terima dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan sudah tepat untuk didiseminasikan menggunakan saluran komunikasi yang sudah ada saat ini. Selain itu, mayoritas responden yang menerima informasi program prioritas pemerintah pun sudah cukup puas akan ketersediaan dan kecepatan penyampaian informasi program prioritas di saluran komunikasi yang mereka gunakan

Rekomendasi

1. Untuk diseminasi informasi yang menargetkan masyarakat sebagai penerima informasi yang pasif dapat menggunakan media televisi, karena media ini masih dominan digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari;
2. Media sosial dapat digunakan sebagai media diseminasi kedua/pendamping yang menguatkan informasi yang sudah disampaikan di media televisi;
3. Untuk diseminasi informasi dengan output aksi masyarakat (seperti imunisasi rubella) dapat menggunakan media komunikasi interpersonal seperti penyulu atau petugas posyandu yang dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam tempo waktu tertentu;
4. Broadcast SMS dari Kementerian Kominfo dapat digunakan untuk mendiseminasikan informasi yang singkat dan padat.

C) Capaian Kinerja Eselon I

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Eselon I Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, capaian realisasi tahun 2018 bisa dibilang sesuai target. Dari 7 Indikator Kinerja Program hanya 1 yang tidak mencapai target. Resumennya adalah sebagai berikut:

1) Capaian Indikator I

No	Indikator Kinerja Program	Target
1	<i>Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.</i>	80%

Tabel 7. Indikator Kinerja Program I

Dalam mengukur progress tingkat kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, di tahun 2018 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga melaksanakan survey responden online (data survey ada dalam lampiran). Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah perlu ditakar sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan komunikasi publik pemerintah. Untuk mengukur capaian dari indikator diatas dilakukan dengan cara survei yang dilakukan melalui kanal di kalangan pengguna media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan Line) @DJIKP. Survei ini diharapkan dapat menakar kepuasan atas layanan informasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan program komunikasi publik pemerintah ke depan.

Dalam survei ini digunakan tiga kelompok indikator, yaitu

- Kelompok indikator PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN yang diarahkan untuk menakar terpaan, ingatan, penjelasan kembali atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah
- Kelompok indikator KUALITAS INFORMASI yang mencakup aspek akurasi, ketepatan waktu, relevansi kemanfaatan dan kemudahan untuk dipahami dan diperoleh.
- Kelompok indikator SALURAN KOMUNIKASI yang mencakup ragam saluran dan ketepatan waktu penyampaian

Jumlah populasi pengikut/penyuka laman media sosial @DJIKP total kurang lebih 50.000 orang, dengan tingkat kepercayaan 98% dan margin error 2, maka jumlah sampel survey yang dibutuhkan sebanyak **2.380** orang responden. Dalam survey ini didapatkan total sampel 2.239 orang responden yang dapat diolah.




Gambar 21. Pengumuman Survei Akses Informasi di Media Sosial @djikp

Dari hasil survei tersebut untuk indikator Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. yang dilaksanakan oleh pemerintah, mendapatkan nilai sebagai berikut:

No	Media	Sangat Setuju	Setuju
1	Buku	18.27	55.29
2	Majalah	14.02	55.52
3	Koran	26.4	60.21
4	Radio	19.07	59.31
5	Televisi	48.64	47.48
6	Luar Ruang	23.22	57.62
	Total	149.62	335.43
	Hasil Rerata	24.93666667	55.905
	Index	80.84166667	

Table 8. hasil survei akses terhadap saluran komunikasi pemerintah

Dari data tersebut maka capaian indikator kinerja program yang berhasil diraih di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
1	<i>Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.</i>	80%	*Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik.	80,84 %	

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Program I

2) Capaian Indikator Kinerja II

No	Indikator Kinerja Program	Target
2	<i>Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunra</i>	80%


Tabel 10. Indikator Kinerja Program II

Dari hasil survei online untuk indikator Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah, mendapatkan nilai sebagai berikut:

No	Media	Sangat Setuju	Setuju
1	Pertunjukan Rakyat	20.41	49.26
2	Forum	34.17	52.84
	Total	54.58	102.1
	Hasil Rerata	27.29	51.05
	Index	78.34	

Table 11. hasil survei akses terhadap saluran komunikasi pemerintah

Dari data tersebut maka capaian indikator kinerja program yang berhasil diraih di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
2	<i>Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat</i>	80%	*Survey Persepsi yang dilaksanakan kepada masyarakat penerima informasi publik.	78,34 %	


Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Program II

3) Capaian Indikator Kinerja III

No	Indikator Kinerja Program	Target
3	<i>Jumlah Jangkauan, Terpaan dan Keterlibatan Masyarakat Tentang Informasi Program Pemerintah Melalui Internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan: 107,4 Juta; Terpaan: 75,1 Juta; Engagement: 11,2 Juta

Tabel 13. Indikator Kinerja Program III

Capaian target dari indikator kinerja ini diukur melalui *analitic tool* untuk setiap aktivitas diseminasi informasi melalui media online dan media sosial yang dimiliki oleh Ditjen IKP antara lain infopublik.id, jpp.go.id, indonesiabaik.id, line kolibri, twitter/facebook/Instagram @djikp. Capaian di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
3	<i>Jumlah Jangkauan, Terpaan dan Keterlibatan Masyarakat Tentang Informasi Program Pemerintah Melalui Internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan: 107,4 Juta; Terpaan: 75,1 Juta; Engagement: 11,2 Juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan: 191,4 Juta; Terpaan: 92,7 Juta; Engagement: 10,7 Juta 	100 %	


Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Program III

4) Capaian Indikator Kinerja IV

No	Indikator Kinerja Program	Target
4	<i>Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pelaksanaan penyusunan narasi Tunggal 65% (KL) • Kepatuhan penyebaran KL (70%) dan Pemda (40%)

Tabel 15. Indikator Kinerja Program IV

Capaian dari indikator ini diukur dengan catatan pelaksanaan penyusunan narasi tunggal oleh kementerian dan Lembaga serta pelaksanaan penyebaran narasi tunggal baik oleh kementerian dan Lembaga dan pemerintah daerah. Di tahun 2018 tercatat sebanyak 40 K/L aktif mengirimkan narasi tunggal terkait dengan tema-tema terkait tugas dan fungsi mereka. Jika diprosentasekan dari jumlah total K/L maka ada 65% sementara untuk dukungan penyebaran narasi tunggal oleh K/L/D terdapat 50 K/L (111%) dan 223 (145%) Pemda (Prov/Kab/Ko).

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
4	<i>Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pelaksanaan penyusunan narasi Tunggal 65% (KL) • Kepatuhan penyebaran KL (70%) dan Pemda (40%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 65% • 107% 	100 %	


Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Program IV

5) Capaian Indikator Kinerja V

No	Indikator Kinerja Program	Target
5	<p><i>Persentase (%) SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik K/L/D yang Meningkatkan Kapasitas dan Kualitasnya dalam Mengelola Informasi:</i></p> <p>a. PPID</p> <p>b. Pranata Humas</p> <p>c. Personil Dinas Kominfo</p>	<p>a. 80 % (Jumlah K/L/Prov)</p> <p>b. 80 % (Jumlah K/L/Prov)</p> <p>c. 80 % (Jumlah Prov)</p>

Tabel 17. Indikator Kinerja Program V

Capaian dari indikator ini diukur melalui survei setelah penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap Pranata Humas pemerintah, anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan personil Dinas Komunikasi dan Informatika. Selama tahun 2018 telah dilaksanakan bimtek Pranata Humas sebanyak 8 kali di Batam, Jakarta, Semarang (2 kali), Bogor (2 Kali), dan Bekasi (2 Kali). Sementara itu untuk personil PPID dan dinas kominfo telah dilaksanakan bimtek sebanyak 5 kali di Bengkulu, Tarakan, Palu, Sorong dan Yogyakarta dengan hasil post test (sebagai dasar capaian kinerja) sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
5	<p><i>Persentase (%) SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik K/L/D yang Meningkatkan Kapasitas dan Kualitasnya dalam Mengelola Informasi:</i></p> <p>a. PPID</p> <p>b. Pranata Humas</p> <p>c. Personil Dinas Kominfo</p>	<p>a. 80 % (Jumlah K/L/Prov)</p> <p>b. 80 % (Jumlah K/L/Prov)</p> <p>c. 80 % (Jumlah Prov)</p>	<p>a. 80 %</p> <p>b. 85 %</p> <p>c. 81 %</p>	100 %	

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Program V

6) Capaian Indikator Kinerja VI


No	Indikator Kinerja Program	Target
6	<i>Persentase (%) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi (Nawacita Digital Library, indonesia.go.id, Konten Berbasis Agenda Setting)</i>	100%

Tabel 19. Indikator Kinerja Program V

Capaian kinerja dari indikator ini diukur melalui capaian produksi dari media yang dimiliki oleh Ditjen IKP selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Media	Target	Capaian	%
1	Infopublik.id	65.000	61.049	93,9%
2	JPP.go.id	14.400	14.011	97,3%
3	Indonesia Baik.id	1.000	667	66,7%
4	Indonesia.go.id	506	600	84,3%

Tabel 20. Produksi Owned Media 2018

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
6	<i>Persentase (%) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi (Nawacita Digital Library, indonesia.go.id, Konten Berbasis Agenda Setting)</i>	100%		100 %	

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Program VI

7) Capaian Indikator Kinerja VII

No	Indikator Kinerja Program	Target
7	<i>Jumlah Pedoman Acuan Penyusunan Konten</i>	4 Pedoman

Tabel 22. Indikator Kinerja Program VII

Capaian indikator kinerja ini ditentukan melalui keberhasilan penyusunan 4 pedoman teknis bidang informasi dan komunikasi publik. Pedoman tersebut diharapkan menjadi pijakan standar dalam pengelolaan dan produksi konten dalam rangka diseminasi informasi publik oleh K/L/D.

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja	%	Status
7	<i>Jumlah Pedoman Acuan Penyusunan Konten</i>	4 Pedoman	1. Standar Kualitas dan Produksi Infografis; 2. Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Bencana; 3. Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah; 4. Pedoman Foto Hebat Pesan Memikat	100 %	

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Program VII

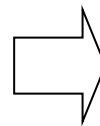
BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkup Eselon I Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Pencapaian di lingkup Eselon I tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja dilingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan.

Tabel 24. Korelasi Pengukuran Capaian IKP dan IKK di Lingkup Ditjen IKP

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Yang Mencapai Bobot 100%
1	Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.	100 %
2	Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat	90%
3	Jumlah Jangkauan, Terpaan dan Keterlibatan Masyarakat Tentang Informasi Program Pemerintah Melalui Internet	100%
4	Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015	100%
5	Persentase (%) SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik K/L/D yang Meningkatkan Kapasitas dan Kualitasnya dalam Mengelola Informasi: a. PPID b. Pranata Humas	100%



Indikator Kinerja Kementarian	Realisasi Capaian
Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	100 %

	c. Personil Dinas Kominfo	
6	Persentase (%) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi (Nawacita Digital Library, indonesia.go.id, Konten Berbasis Agenda Setting)	100%
7	Jumlah Pedoman Acuan Penyusunan Konten	100%

2. Saran

Ditjen IKP perlu meninjau kembali (review) secara regular agar indikator kinerja dapat lebih berkaitan (berkorelasi erat) sehingga capaian baik Program Ditjen IKP maupun Kemkominfo dapat mencapai target yang ditetapkan. Review komprehensif harus dilakukan terhadap Indikator Kinerja yang merujuk kepada RPJMN 2015-2019 maupun Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Direktif Menkominfo. Upaya peninjauan kembali tersebut perlu dibahas secara bersama-sama oleh Kemenkominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan berbagai stakeholders terkait lain terutama pada masa akhir RPJMN 2015-2019. Review tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan RPJMN masa berikutnya (2020-2024).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan indikator dipastikan harus selaras dan setiap indikator tersebut dipastikan dapat diukur berkonsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). Pengukuran indikator yang bersifat Outcome perlu disempurnakan dengan menyusun data dasar awal dan dirancang metodologi pengukurannya melalui survey komprehensif (bila memungkinkan tidak hanya melalui survei online) yang mewakili masyarakat yang menjadi sasaran diseminasi informasi public.

Referensi

Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Edelman Trust Barometer 2019 Global Result:

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf?utm_source=website&utm_medium=global_report&utm_campaign=downloads

IDN Research Institute: Indonesia Millennial Report 2019:

<https://www.idntimes.com/indonesiamillennialreport2019>

Lampiran I: Tabel 25. Laporan Realisasi Keuangan 2018

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Pemahaman Masyarakat atas Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah	1. Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.	80%	100%	Rp 291,612,867,000.00	Rp 289,034,516,730.00	99.12%
		2. Persentase (%) masyarakat yang memahami program prioritas pemerintah melalui media tatap muka dan pertunjukan rakyat	80%	98%			
		3. Jumlah jangkauan, terpaan dan keterlibatan masyarakat (netizen) tentang informasi program prioritas pemerintah melalui internet	a. Jangkauan 107,4Juta b. Terpaan 75,1 Juta c. Engagement 11,2 Juta	100%			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Informasi	1. Persentase (%) K/L/D yang melaksanakan Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai Inpres No. 9 Tahun 2015	a. Kepatuhan pelaksanaan penyusunan narasi Tunggal 100% (KL) b. Kepatuhan penyebaran KL (70%) dan Pemda (40%)	100%	Rp 9,156,592,000.00	Rp 9,007,405,911.00	98.37%

		2. Persentase (%) SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik K/L/D yang Meningkatkan Kapasitas dan Kualitasnya dalam Mengelola Informasi: a. PPID b. Pranata Humas c. Personil Dinas Kominfo	a. 80 % (Jumlah K/L/Prov) b. 80 % (Jumlah K/L/Prov) c. 80 % (Jumlah Prov)	100%	Rp 5,160,450,000.00	Rp 5,096,685,080.00	98.76%
		3. Persentase (%) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Terintegrasi (Nawacita Digital Library, indonesia.go.id, Konten Berbasis Agenda Setting)	100%	100%	Rp 8,792,816,000.00	Rp 8,469,215,706.00	96.32%
		4. Jumlah Pedoman Acuan Penyusunan Konten	4	100%	Rp 1,602,702,000.00	Rp 1,591,204,846.00	99.28%

**Lampiran II. Hasil Survei Online Akses Informasi Publik tentang Kebijakan dan Program
Prioritas Pemerintah**

MINTA TOLONG LAYOUTIN PPT TERLAMPIR YO MAS!!!

Hasil Survey Online:

[https://www.dropbox.com/s/a00v5gk86gl00f7/HASIL %20SURVEI%20ONLINE%202018 05122018.pptx?dl=0](https://www.dropbox.com/s/a00v5gk86gl00f7/HASIL%20SURVEI%20ONLINE%202018%2005122018.pptx?dl=0)